

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1. Deskripsi Konseptual

Deskripsi konseptual penelitian ini mengkaji pengaruh pengungkapan ESG terhadap kualitas laba dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan makanan dan minuman di BEI. Melalui integrasi beberapa teori akuntansi dan tata kelola, kerangka ini menguji apakah pengawasan investor institusional mampu memperkuat dampak transparansi ESG dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.1.1 Teori agensi (*Agency Theory*)

Konsep teori agensi awalnya diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976, yang membagi hubungan keagenan ke dalam dua rumpun utama. Bentuk hubungan tersebut terjadi antara pihak manajemen dengan pemilik saham (*shareholders*), serta antara manajemen dengan pihak penyedia dana pinjaman (*bondholders*). Teori ini memandang interaksi kerja sebagai sebuah bentuk ikatan kontrak antara dua pihak atau lebih, yakni pihak pemilik (*principal*) dan pihak pengelola (*agent*). Dalam praktiknya, *principal* menyerahkan wewenang pengambilan keputusan (*decision making*) kepada *agent*. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilik memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola untuk menuntaskan tanggung jawab tertentu sesuai ketentuan kontrak yang disetujui bersama. Seluruh batas wewenang serta hak masing-masing pihak telah diatur secara formal di dalam dokumen perjanjian tersebut (Purba, R. B., 2023).

Penelitian Widjaja, N. D., dan Suhendah, R. (2025), menjelaskan dalam kerangka teori agensi, *principal* dan agent terikat oleh kontrak formal yang mengatur hak serta kewajiban masing-masing secara eksplisit. Investor, sebagai *principal*, menempatkan kepercayaan pada manajer atau agent untuk menjaga integritas dalam pengelolaan investasi serta memastikan tidak adanya penyimpangan yang merugikan pemilik modal. Guna mewujudkan tanggung jawab tersebut, pengelola wajib memaparkan pencapaian operasional entitas lewat dokumen laporan keuangan yang menyeluruh. Berkas keuangan inilah yang nantinya berfungsi sebagai media penyedia data bagi penanam modal dalam mengukur capaian serta kondisi ekonomi riil korporasi.

Teori agensi juga menyoroti potensi konflik kepentingan antara *principal* dan agent. Konflik ini terjadi ketika manajemen tidak sepenuhnya bertindak demi kepentingan pemilik, melainkan mengejar tujuan pribadi seperti bonus, reputasi, atau kinerja jangka pendek yang tercermin dalam laba akuntansi. Kondisi tersebut dapat mendorong praktik *earnings management* atau rekayasa laba, sehingga mengurangi kualitas laba yang sesungguhnya. Upaya untuk mereduksi potensi benturan kepentingan ini dapat ditempuh dengan cara mendongkrak keterbukaan informasi publik, salah satunya lewat pelaporan indikator *Environmental, Social, and Governance* secara transparan.

Pengungkapan ESG berfungsi sebagai sarana bagi manajemen untuk menunjukkan kinerja non-keuangan dan tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Dengan adanya pelaporan ESG yang memadai, asimetri informasi antara agent dan *principal* dapat berkurang karena

pemegang saham memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai praktik keberlanjutan perusahaan. Selain itu, kepemilikan institusional juga memiliki peran penting dalam kerangka teori agensi sebagai mekanisme pengawasan eksternal. Investor institusional umumnya memiliki kemampuan analisis dan akses informasi yang lebih luas dibandingkan investor individu, sehingga mampu menilai dengan lebih kritis tindakan manajemen. Menurut Tambunan, R., dan Wahyuliza, S. (2024), serta Akhsani, K. R., dan Sumarta, N. H. (2025), kepemilikan institusional dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen dengan meningkatkan tuntutan terhadap transparansi, termasuk dalam pelaporan ESG. Peningkatan pengawasan tersebut pada akhirnya mampu menekan praktik manipulasi laba dan memperkuat kualitas laba yang dilaporkan perusahaan.

2.1.2 Teori legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Konsep legitimasi menekankan pentingnya perusahaan menyelaraskan seluruh kegiatan operasional mereka dengan adat, etika, serta ekspektasi publik demi menjaga pengakuan dari lingkungan sosial. Ketika ekspektasi publik terhadap perilaku organisasi berubah, perusahaan dituntut untuk menyesuaikan diri guna mempertahankan dukungan sosial tersebut. Dalam konteks bisnis modern, teori legitimasi menjadi dasar bagi perusahaan untuk menampilkan citra positif melalui pengungkapan informasi non-keuangan seperti laporan keberlanjutan atau *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Menurut Suchman (1995) dalam Sari et al. (2025), Sudut pandang ini mengartikan legitimasi sebagai sebuah pandangan kolektif bahwa seluruh operasi sebuah organisasi telah sejalan dengan tatanan moral, prinsip, serta aturan sosial yang

berlaku di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan berupaya menjaga legitimasi agar aktivitas operasionalnya diterima dan dipercaya oleh publik.

Melalui pelaporan ESG, korporasi memiliki instrumen taktis untuk membuktikan kepedulian mereka terhadap alam dan komunitas, sekaligus mengamankan pengakuan dari publik. Permatasari, M. P., dan Setyastrini, N. L.P. (2023), perusahaan yang melaksanakan pengungkapan tanggung jawab sosial secara transparan berupaya membangun kepercayaan publik dan meminimalkan kesenjangan antara ekspektasi sosial dengan kegiatan ekonomi yang dijalankan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Hidayat, K., dan Zuhroh, D. (2023) Pandangan tersebut menilai bahwa entitas yang secara transparan memublikasikan laporan ESG berpeluang mendapatkan penerimaan publik yang lebih luas. Hal ini dikarenakan keterbukaan informasi tersebut mencerminkan komitmen nyata korporasi terhadap kelestarian ekologi, kemakmuran warga, serta manajemen yang akuntabel.

Teori legitimasi juga menjelaskan bahwa organisasi dapat menggunakan laporan keberlanjutan sebagai alat simbolik untuk mempengaruhi persepsi publik. Sriwijayanti et al. (2025), Hal ini membuktikan bahwa pelaporan ESG bukan sekadar formalitas moral, melainkan instrumen komunikasi taktis untuk meredam tuntutan pihak eksternal sekaligus membangun citra baik korporasi. Oleh karena itu, orientasi organisasi tidak lagi sebatas memburu profitabilitas semata, melainkan juga berpusat pada upaya merawat komitmen publik dan memperkuat posisi sosial emiten di tengah masyarakat.

Teori legitimasi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pengungkapan ESG dengan kualitas laba pada perusahaan sektor manufaktur. Pengungkapan ESG mencerminkan sejauh mana perusahaan berkomitmen terhadap nilai-nilai sosial dan lingkungan yang diharapkan masyarakat. Semakin tinggi legitimasi yang diperoleh, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan praktik manajemen laba yang dapat menurunkan kualitas informasi keuangan. Dengan demikian, teori legitimasi memberikan dasar konseptual bahwa keterbukaan informasi ESG merupakan upaya perusahaan dalam mempertahankan kepercayaan publik, meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, dan memperkuat keberlanjutan usaha.

2.1.3 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal mengemukakan mekanisme transfer informasi dari pihak internal (manajemen) kepada pihak eksternal dengan sasaran menyelesaikan ketimpangan atau perbedaan informasi (*asymmetry information*) di pasar (Spence, 1973). Teori sinyal meyakini bahwa informasi mengenai kesehatan keuangan serta prospek suatu entitas tidak tersedia bagi semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan. Penelitian Kumalasari, V. (2023) menjelaskan bahwa dalam studi akuntansi dan pemeriksaan, manajemen sengaja memanfaatkan berbagai aspek pengungkapan informasi formal sebagai medium untuk mengirimkan stimulus tertentu mengenai kondisi riil entitas. Informasi tersebut kemudian ditangkap dan diinterpretasikan sebagai indikator keputusan penting oleh para pemodal di bursa efek Indonesia.

Dalam perkembangannya, bentuk transmisi informasi positif yang dikirimkan ke pasar tidak lagi terbatas pada instrumen keuangan konvensional seperti ketepatan waktu pelaporan laba (*earnings timeliness*), melainkan telah meluas pada pelaporan non-keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, Penelitian Farrel, M. C., dan Dewi, F. G. (2025) memperkuat pandangan bahwa pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* bertindak sebagai sebuah sinyal positif (*good news*) bagi publik dan pelaku pasar. Emiten yang aktif memublikasikan kinerja ESG cenderung memperoleh persepsi positif dari investor dan masyarakat luas yang bertindak sebagai penyedia modal. Hal ini karena pelaporan ESG mencerminkan komitmen korporasi terhadap keberlanjutan dan standar etika bisnis yang tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat transparansi informasi ESG yang disajikan, semakin berkualitas sinyal informasi yang ditangkap oleh pelaku pasar modal, yang pada gilirannya berdampak pada penguatan kepercayaan investor serta meningkatnya stabilitas nilai jangka panjang perusahaan.

2.1.4 Kualitas Laba

Derajat keandalan laba mencerminkan sejauh mana arus keuntungan yang dilaporkan mampu merefleksikan kondisi fundamental keuangan perusahaan secara objektif, terbebas dari distorsi rekayasa akuntansi. Perolehan laba yang berintegritas ini menjadi stimulus penting bagi konsistensi performa finansial, yang secara simultan memperkuat posisi tawar korporasi di mata investor serta pemangku kepentingan eksternal. Selain itu, kualitas laba yang baik juga menunjukkan rendahnya praktik manipulasi akuntansi oleh manajemen, karena

laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian serta mengikuti standar pelaporan yang berlaku. Penelitian Yusmaniarti et al., (2023) menegaskan bahwa informasi kualitas laba merupakan elemen krusial dalam laporan tahunan yang paling dicermati oleh pihak luar, khususnya penanam modal. Hal ini dikarenakan kualitas laba menjadi acuan dasar bagi investor untuk menilai kinerja fundamental organisasi serta memitigasi risiko investasi. Tingginya laba yang dipublikasikan tidak serta merta mencerminkan mutu substansial dari perolehan laba itu sendiri jika tidak dibarengi dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, evaluasi terstruktur terhadap kualitas laba mutlak diterapkan untuk memastikan bahwa nilai laba tersebut bersih dari distorsi manajemen dan benar-benar menggambarkan keadaan finansial perusahaan secara riil.

Intervensi kebijakan akuntansi melalui manajemen laba (*earnings management*) maupun perataan laba berpotensi besar menimbulkan asimetri informasi yang mendistorsi kesimpulan para pengguna laporan tahunan. Konsekuensi dari risiko tersebut menempatkan kualitas laba sebagai parameter fundamental untuk memverifikasi validitas data keuangan, sekaligus menjamin nominal profit yang tersaji benar-benar steril dari salah saji material. Derajat keandalan angka keuntungan inilah yang pada akhirnya menjadi determinan utama dalam menentukan kelayakan laporan keuangan sebagai basis pengambilan keputusan ekonomi yang kredibel. Dalam penelitian Janah, W., Zulaika, T., dan Angela, L. M. (2023) Kajian akuntansi keuangan memandang kualitas laba (*earnings quality*) bukan sebagai indikator yang mewajibkan perusahaan untuk selalu melaporkan hasil laba bersih yang positif (*net profit*). Esensi dari kualitas

laba terletak pada sejauh mana angka-angka dalam laporan laba rugi memiliki derajat keandalan yang tinggi dalam merepresentasikan realitas ekonomi entitas yang sebenarnya. Oleh sebab itu, performa keuangan yang menunjukkan kerugian bersih (*net loss*) tidak secara otomatis mematikan nilai informatif dari laporan tersebut. Informasi mengenai kerugian tetap dikategorikan memiliki kualitas yang unggul apabila angka minus yang disajikan didukung penuh oleh realisasi arus kas dari aktivitas operasi yang nyata. Kriteria mutu ini terpenuhi jika nilai pelaporan tersebut terbukti steril dari tindakan rekayasa akuntansi, manipulasi kosmetik akrual, maupun kebijakan oportunistik manajemen dalam menunda pengakuan beban.

Kualitas laba juga erat berkaitan dengan kemampuan perusahaan menjaga konsistensi kinerja pada jangka panjang. Publikasi keuntungan yang tepercaya umumnya memicu reaksi pasar yang menguntungkan. Hal ini dikarenakan data profitabilitas tersebut bertindak sebagai isyarat objektif mengenai keberlanjutan dan masa depan bisnis entitas. Ketika laba yang dihasilkan benar-benar didukung oleh arus kas operasional yang kuat, pengguna laporan keuangan lebih yakin bahwa performa perusahaan tidak bersifat sementara atau hasil dari rekayasa manajemen. Maka dari itu, keandalan laba yang optimal tidak sebatas menunjukkan keberhasilan operasional jangka pendek, melainkan juga mengonfirmasi kesiapan emiten dalam mempertahankan kelangsungan bisnis serta merealisasikan target investasi jangka panjang (Widianto, R., dan Astuti, C. D. 2024).

Kredibilitas kualitas laba juga dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan, termasuk efektivitas tata kelola dan kapasitas perusahaan dalam mengelola risiko pelaporan. Perusahaan yang memiliki pengawasan kuat cenderung menghasilkan laporan laba yang lebih transparan serta bebas dari penyimpangan yang merugikan investor (Muslih, M 2024). Standar pelaporan yang baik membantu meminimalkan peluang terjadinya manipulasi akrual maupun penyalahgunaan estimasi akuntansi. Semakin disiplin perusahaan dalam penerapan aturan pelaporan keuangan, semakin tinggi kualitas laba yang dihasilkan dan semakin kecil kemungkinan laporan tersebut menyesatkan pengguna informasi (Putri, K. D., dan Imron, M. 2022).

Kualitas laba juga dipengaruhi oleh sistem pengawasan dan transparansi yang diterapkan. Mekanisme audit internal dan eksternal, kepemilikan institusional, serta peran komite audit dapat meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dan menekan perilaku oportunistik manajer. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi kunci penting dalam menjaga keandalan laba yang dilaporkan (Hamid, H., Afiah, N., dan Azis, F. 2024). Butarbutar, A. M., Manurung, A., dan Siringoringo, J. M. (2025) Di samping itu, dinamika riset terbaru mengindikasikan keterkaitan erat antara transparansi faktor ESG dengan reliabilitas keuntungan. Publikasi isu berkelanjutan yang optimal menunjukkan integritas organisasi terhadap kode etik bisnis serta kelestarian lingkungan. Pada akhirnya, kondisi ini mampu mendongkrak kredibilitas emiten bagi pemodal sekaligus membatasi intensi pengelola dalam mempraktikkan kosmetik akuntansi.

Salah satu indikator utama kualitas laba adalah keterkaitannya dengan arus kas operasi. Luthfy, F. A., dan Yanti, H. B. (2025) Menunjukkan bahwa laba yang ditopang oleh arus kas operasional yang kuat mencerminkan bahwa laba tersebut benar-benar berasal dari aktivitas ekonomi yang nyata, bukan akibat dominasi unsur akrual. Dalam hal ini, arus kas operasi berfungsi sebagai alat verifikasi karena sifatnya lebih objektif dan relatif sulit dimanipulasi, sehingga mampu menggambarkan tingkat keandalan laba yang lebih tinggi. Sejalan dengan hal itu, tingginya tingkat keselarasan nilai keuntungan bersih dengan realisasi kas dari aktivitas operasional mengonfirmasi keandalan profit yang dilaporkan. Kondisi ini membuktikan bahwa informasi profitabilitas tersebut mampu memotret realitas finansial organisasi secara objektif, sehingga meningkatkan derajat kepercayaan para pemakai laporan tahunan dalam menganalisis data keuangan tersebut.

Kualitas laba dapat dinilai melalui perbandingan antara arus kas yang berasal dari aktivitas operasional dengan laba bersih perusahaan. Menurut Siladjaja, M. (2025) Rasio ini mencerminkan sejauh mana laba yang dilaporkan memiliki dukungan dari arus kas riil yang dihasilkan dari kegiatan utama perusahaan, sehingga dapat menunjukkan tingkat keandalan laba semakin tinggi kedekatan atau rasio kualitas laba semakin baik. Berlandaskan pada studi empiris oleh Khafid dan Anita (2025) serta Anggraeni et al. (2025), evaluasi terhadap kualitas laba (*earnings quality*) wajib merefleksikan seluruh spektrum hasil akhir laporan keuangan, tanpa mengecualikan emiten yang membukukan laba bersih negatif atau kerugian. Kualitas laba difokuskan pada tingkat keselarasan antara laba akuntansi (baik *profit* maupun *loss*) dengan realisasi arus kas operasi. Oleh

karena itu, angka kerugian bersih tetap memiliki relevansi nilai untuk diuji sejauh mana informasi tersebut disajikan secara andal dan bebas dari rekayasa pembukuan oleh manajemen. Secara matematis, tingkat keandalan laba dalam kajian ini diukur dengan menggunakan formulasi rasio keuangan sebagai berikut:

$$\text{Kualitas Laba} = \frac{\text{Arus Kas Operasi}}{\text{Laba Bersih}}$$

2.1.5 *Environmental*

Lingkungan ini mengukur kinerja pengungkapan informasi perusahaan yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan hidup . Aspek yang dinilai mencakup bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungannya, seperti efisiensi penggunaan energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Poin ekologi (*environmental*) bertindak sebagai elemen krusial dalam pilar laporan berkelanjutan (ESG) yang mengukur tata kelola risiko operasional korporasi terhadap kelestarian alam. Ruang lingkup aspek ini mengintegrasikan indikator-indikator strategis, meliputi minimalisasi emisi karbon, pemrosesan limbah industri, penghematan konsumsi energi, hingga ketaatan entitas pada undang-undang kelestarian lingkungan hidup. *Environmental* menjadi bagian penting dalam praktik keberlanjutan perusahaan yang semakin diperhatikan oleh investor dan pemangku kepentingan (Sinaga et al., 2025).

Seiring meningkatnya kesadaran global terhadap isu perubahan iklim, perusahaan dituntut untuk tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitasnya. Perusahaan mulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnisnya, termasuk

melalui pengungkapan informasi lingkungan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan. Publikasi data tersebut diarahkan demi mendongkrak keterbukaan informasi publik, sekaligus menekan kesenjangan pengetahuan (*asymmetry information*) yang terjadi antara pengelola organisasi dengan para pemodal (Rismawati et al., 2023). Salah satu bentuk implementasi dari dimensi *environmental* adalah *environmental disclosure*, yaitu pengungkapan informasi terkait aktivitas dan kinerja lingkungan perusahaan. Informasi ini biasanya mencakup penggunaan sumber daya, pengelolaan limbah, serta emisi gas rumah kaca. Anita, A., Hernawati, E. dan Rossa, V. D. (2025) menyatakan bahwa *environmental disclosure* merupakan indikator penting dalam menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap lingkungan

Kuantifikasi terhadap variabel *Environmental* dalam kajian ini diaplikasikan lewat instrumen *Environmental Disclosure Index* (EnDI). Metrik ini berfungsi memotret intensitas pengungkapan data terkait operasional hijau emiten di dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan. Secara praktis, komponen pengukurannya mengadopsi standar global yang dirilis oleh *Global Reporting Initiative* (GRI), dengan memfokuskan analisis pada rumpun standar spesifik topik GRI 300. Klaster indikator tersebut memuat poin-poin krusial seperti efisiensi energi, keluaran emisi, manajemen limbah, hingga tingkat ketaatan hukum lingkungan. Implementasi pendekatan analisis isi ini membantu dalam mengevaluasi derajat keterbukaan manajemen terkait konsekuensi ekologis dari aktivitas operasional entitas (Triadita, D. P. dan Lahaya, I. A. 2024).

Pengukuran dampak lingkungan dari aktivitas operasional perusahaan seperti emisi karbon pengguna energi dan air pengolah limbah serta risiko perubahan iklim, Lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai alat lapor tetapi juga sebagai dasar perencanaan strategi efisiensi operasional dan mitigasi resiko jangka panjang yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Metode yang digunakan dalam pengukuran EnDI adalah *content analysis*, yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap item-item pengungkapan lingkungan dalam laporan perusahaan. Setiap item yang diungkapkan akan diberi skor 1, sedangkan item yang tidak diungkapkan diberi skor 0. Selanjutnya, skor tersebut dijumlahkan dan dibandingkan dengan total item pengungkapan yang seharusnya diungkapkan. (Abdullah et al., 2022) Rumus perhitungan EnDI adalah sebagai berikut:

$$\text{EnDI} = \frac{\sum X_i}{N}$$

Keterangan:

EnDI = *Environmental Disclosure Index*

$\sum X_i$ = Jumlah item *environmental* yang diungkapkan perusahaan

N = Total item pengungkapan *environmental* yang digunakan dalam penelitian

2.1.6 Social

Sosial mencakup bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di luar kegiatan inti operasionalnya. Fokus utama pilar ini adalah bagaimana perusahaan mengelola hubungan sosial dengan berbagai pihak, termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, dan komunitas lokal. Kinerja sosial yang baik melibatkan interaksi yang efektif, kerja sama, dan penghormatan

terhadap keberagaman. Dimensi ini mencakup berbagai aspek seperti kesejahteraan karyawan, hak asasi manusia, tanggung jawab terhadap konsumen, serta kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. Dalam praktiknya, aspek sosial menjadi penting karena perusahaan tidak hanya beroperasi untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis dengan karyawan, pelanggan, dan masyarakat melalui berbagai program sosial dan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan (Kartika, F., Dermawan, A., dan Hudaya, F. 2023).

Implementasi dari dimensi sosial adalah *social disclosure*, yaitu pengungkapan informasi terkait aktivitas sosial perusahaan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan. Cakupan informasi yang dipublikasikan mengintegrasikan rumpun ketenagakerjaan, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengembangan kompetensi staf, hingga realisasi agenda tanggung jawab sosial korporasi. Pelaporan instrumen tersebut diarahkan demi mendongkrak keterbukaan informasi emiten, sekaligus menyediakan data yang bernilai guna bagi kepentingan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan (Nasution et al., 2024).

Kuantifikasi atas variabel kemasyarakatan dalam kajian ini dihitung melalui instrumen *Social Disclosure Index* (SoDI). Metrik tersebut diaplikasikan guna memotret tingkat transparansi data operasional sosial emiten di dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan. Secara umum, pelaporan komponen ini berkiblat pada kerangka kerja internasional *Global Reporting Initiative* (GRI),

khususnya pada kelompok standar spesifik topik GRI 400. Klaster indikator tersebut mengintegrasikan poin-poin penting seperti kebijakan ketenagakerjaan, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penghormatan hak asasi manusia (HAM), hingga kontribusi nyata terhadap komunitas lokal. Dalam berbagai studi terdahulu, proksi pengungkapan sosial memang jamak diukur menggunakan matriks berbasis indeks GRI, sebuah pendekatan yang selaras dengan temuan Hasanah et al., (2025) bahwa evaluasi aktivitas tanggung jawab sosial korporasi (CSR) dinilai paling representatif menggunakan standar acuan tersebut. Senada dengan hal itu, rumpun studi terdahulu turut mengonfirmasi bahwa evaluasi mengenai data kemasyarakatan serta instrumen ESG jamak ditelaah lewat konten laporan keberlanjutan. Dokumentasi tersebut menjadi bukti autentik atas derajat keterbukaan manajemen terkait realisasi program sosial yang dijalankan korporasi (Rosalia dan Wiwiek Prihandini, 2024). Metode yang digunakan dalam pengukuran adalah *content analysis*, yaitu dengan mengidentifikasi item-item pengungkapan sosial dalam laporan perusahaan. Sistem penilaian diaplikasikan secara biner, di mana nilai satu (1) disematkan apabila poin indikator diulas oleh manajemen, sedangkan nilai nol (0) diberikan jika poin tersebut dilewatkan. Akumulasi dari seluruh perolehan nilai tersebut selanjutnya dikalkulasikan terhadap jumlah total parameter pengungkapan ideal yang dipersyaratkan (Sari D. M. et al., 2026) Rumus *Social Disclosure Index* adalah sebagai berikut :

$$\text{SoDI} = \frac{\sum X_i}{N}$$

Keterangan:

SoDI = *Social Disclosure Index*

ΣX_i = Jumlah item sosial yang diungkapkan

N = Total item pengungkapan sosial yang digunakan dalam penelitian

Nilai SoDI berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai SoDI, maka semakin luas pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam aspek sosial.

2.1.7 Governance

Pilar tata kelola (*governance*) merepresentasikan pilar fundamental dalam kerangka kerja ESG yang mengatur regulasi, tatanan struktural, serta instrumen kontrol demi memastikan operasional korporasi berjalan selaras dengan asas keterbukaan, pertanggungjawaban, kemandirian, kepatuhan hukum, serta kesetaraan. Implementasi tata kelola yang andal memegang peranan krusial untuk menjamin bahwa segala kebijakan pengelola organisasi berorientasi pada kemakmuran pemilik modal sekaligus pihak terafiliasi lainnya. Dimensi operasional ini mengintegrasikan komponen-komponen strategis, meliputi formasi dewan pengawas, efektivitas komite audit, konfigurasi kepemilikan saham, hingga keandalan sistem pengawasan internal entitas. Pada realisasinya, tata kelola bertindak sebagai determinan utama dalam mendongkrak kredibilitas emiten bagi para pemodal karena menjadi potret objektif atas kapabilitas manajemen jangka panjang. Penelitian oleh (Fujianti et al., 2024) menunjukkan

bahwa pengungkapan ESG, khususnya aspek tata kelola, berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.

Pengungkapan *governance* merupakan bentuk transparansi perusahaan dalam menyampaikan informasi terkait tata kelola. Informasi ini meliputi struktur organisasi, kebijakan perusahaan, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa perusahaan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab (Nasution, M. I. S., Yulia, I. A. dan Fitrianti, D. 2024). Dalam praktiknya, pengungkapan *governance* juga mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI) khususnya seri GRI 100 yang merupakan standar universal dalam pelaporan keberlanjutan. GRI 100 berisi prinsip-prinsip umum pelaporan yang mencakup tata kelola organisasi, etika dan integritas, keterlibatan pemangku kepentingan, serta praktik pengelolaan perusahaan yang berkelanjutan. Melalui pedoman tersebut, perusahaan diharapkan mampu menyampaikan informasi tata kelola secara lebih transparan dan terstruktur dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan.

Pengukuran variabel *governance* dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Governance Disclosure Index* (GDI), yaitu indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan informasi terkait tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan. Pengungkapan *governance* mencerminkan sejauh mana perusahaan menyampaikan informasi mengenai struktur organisasi, mekanisme pengawasan, serta kebijakan yang mendukung penerapan *good corporate governance*. Dalam penelitian empiris, pengukuran

governance umumnya dilakukan melalui analisis laporan perusahaan menggunakan metode *content analysis*, yaitu dengan menilai item-item pengungkapan tata kelola yang disajikan dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan berdasarkan indikator-indikator yang terdapat dalam standar GRI.

Pendekatan ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa pengungkapan ESG, termasuk aspek *governance*, diukur melalui tingkat pengungkapan informasi perusahaan yang dianalisis dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan (Nugroho, A. dan Sabaruddin, L. O. 2025). Metode *content analysis* dilakukan dengan memberikan skor pada setiap item pengungkapan *governance*. Setiap item yang diungkapkan diberi nilai 1, sedangkan yang tidak diungkapkan diberi nilai 0. Skor tersebut kemudian dijumlahkan dan dibandingkan dengan total item pengungkapan yang digunakan dalam penelitian. (Sari et al., 2026) Rumus *Governance Disclosure Index* adalah sebagai berikut:

$$GDI = \frac{\sum X_i}{N}$$

Keterangan:

GDI = *Governance Disclosure Index*

$\sum X_i$ = Jumlah item *governance* yang diungkapkan

N = Total item pengungkapan *governance*

Rentang perolehan skor GDI berada pada batas angka 0 sampai 1. Peningkatan pada akumulasi nilai GDI mengindikasikan semakin komprehensifnya penyajian informasi tata kelola oleh emiten. Kondisi tersebut membuktikan bahwa organisasi memiliki kualitas keterbukaan serta

pertanggungjawaban operasional yang lebih unggul dalam menerapkan prinsip pilar kelola *governance*.

2.1.8 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham institusional merepresentasikan porsi kepemilikan modal badan usaha yang dikuasai oleh entitas korporasi, termasuk korporasi asuransi, lembaga perbankan, perusahaan investasi, maupun organisasi finansial sejenis. Kepemilikan jenis ini memegang kontribusi krusial dalam menekan potensi benturan kepentingan agensi (*agency conflict*) yang sering kali muncul antara pihak pengelola dengan pemilik saham entitas. Penelitian Napitupulu, L. S., dan Azzahra, K. (2024) Struktur kepemilikan oleh lembaga merujuk pada porsi efek modal emiten yang dikuasai oleh badan usaha korporasi non-individu, contohnya instansi asuransi maupun lembaga pengelola dana pensiun, dan bukan atas nama penanam modal ritel perorangan. Eksistensi instrumen ini bernilai strategis karena berperan aktif sebagai media supervisi luar (*external monitoring*) terhadap segala kebijakan yang diambil pengelola. Berbagai instansi finansial tersebut dinilai mempunyai pengaruh dominan serta kapabilitas dana yang kuat untuk mereduksi tindakan oportunistik pengelola, salah satunya kosmetik akuntansi manipulasi keuntungan (*earnings management*). Di samping kontribusinya dalam fungsi pengendalian serta pencegahan friksi agensi, kedudukan kepemilikan dari lembaga ini turut dievaluasi dalam literatur empiris bertindak selaku variabel pengontrol yang menaungi interaksi dari variabel independen (seperti pilar keberlanjutan) terhadap valuasi total korporasi (Nabit, M., dan Helmy, H. 2025).

Proksi kepemilikan oleh lembaga dikuantifikasi melalui perbandingan antara volume lembar saham yang dikuasai pihak instansi terhadap agregat modal saham yang diterbitkan oleh emiten. Rasio ini dipilih karena mampu merepresentasikan kedalaman supervisi eksternal serta kekuatan kendali di dalam korporasi. Kenaikan pada rasio saham institusi ini mengindikasikan fungsi pengawasan yang semakin optimal dalam mereduksi benturan kepentingan agensi (*agency conflict*), sekaligus memicu peningkatan akuntabilitas laporan tahunan. Pengukuran empiris tersebut diterapkan guna menguji intensitas keterlibatan saham badan usaha non-individu pada emiten, sekaligus memotret efektivitas kontrol struktural atas setiap keputusan pihak manajemen (Ikram et al., 2024). Adapun formulasi matematis yang digunakan untuk menghitung variabel tersebut disajikan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai bahan pertimbangan permasalahan penelitian. Beberapa pencarian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	(Reza, E., 2025)	Pengaruh pengungkapan faktor lingkungan, sosial dan tata	Kuantitatif	Lingkungan, sosial, dan tata kelola tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

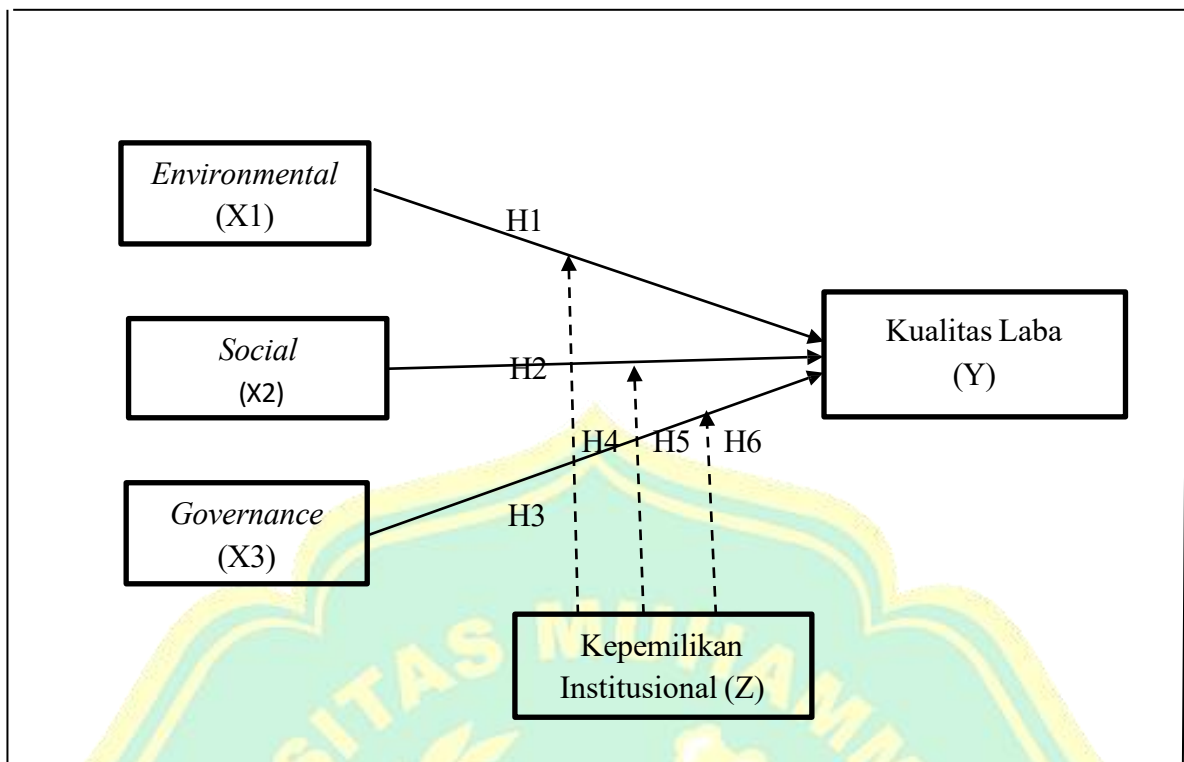
No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil
		kelola terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor otomotif		
2.	(Septiani, D., Sari, D. K., dan Niser, 2026)	Pengaruh <i>Environmental, Social, Governance</i> (ESG) dan Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur.	Kuantitatif Analisis Regresi Data Panel	Pengungkapan komponen ESG secara simultan berhubungan dengan pembentukan kualitas laba korporasi. Transparansi laporan non-keuangan berkontribusi menekan distorsi informasi finansial.
3.	(Muslih, M., 2024)	Pengaruh <i>Prudence</i> , Kepemilikan Manajerial, Volatilitas Laba, Dan Kepemilikan institusional terhadap kualitas laba.	Kuantitatif software Eviews 12.	<i>Prudence</i> berdampak positif nyata pada keandalan laba, sedangkan kepemilikan institusional berdampak negatif. Secara parsial, kepemilikan manajerial dan volatilitas laba tidak menunjukkan pengaruh. Namun secara simultan, seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Emiten disarankan memperkuat asas kehati-hatian pembukuan demi menyajikan informasi profit yang kredibel.
4.	(Sululing, S., Pagalung G. dan	Pengungkapan ESG dan Pengaruhnya	Kuantitatif	Hasil ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil
	Amiruddint, 2025)	terhadap Kualitas Laba.		teori pemangku kepentingan dan legitimasi dalam konteks pasar negara berkembang. Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan harus memperkuat substansi pelaporan sosial dan tata kelola sambil meningkatkan kualitas pengungkapan lingkungan untuk memastikan relevansi yang lebih besar dan verifikasi independen. Implikasi kebijakan juga muncul bagi regulator untuk meningkatkan standar pelaporan ESG dengan mengembangkan pedoman sektoral yang lebih jelas dan menerapkan jaminan pihak ketiga, khususnya dalam hal aspek lingkungan.
5.	(Triyono & Azzakhhusna, 2026)	Pengungkapan <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG), Kepemilikan Institusional, Kinerja Perusahaan: Perspektif Teori Signaling	Kuantitatif, analisis regresi linier berganda dan <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) dengan sampel perusahaan nonkeuangan di BEI 2020-2025.	Seluruh pilar ESG terbukti berkontribusi positif nyata dalam mendorong performa emiten. Selain itu, kepemilikan institusional terbukti memperkuat hubungan tersebut karena peran supervisi lembaga mampu mendorong

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil
				optimalisasi kebijakan ESG demi penciptaan nilai jangka panjang.

2.3. Kerangka Konseptual

Alur pemikiran dalam kerangka konseptual ini memetakan logika hubungan logis antarlables atau variabel yang dianalisis dalam riset. Fokus utama penelitian difokuskan untuk menguji dampak dari publikasi komponen ESG selaku variabel bebas (*independen*) terhadap keandalan laba selaku variabel terikat (*dependen*). Di samping itu, pengujian ini turut melibatkan struktur kepemilikan saham oleh lembaga (*kepemilikan institusional*) bertindak selaku variabel pemoderasi. Penyertaan instrumen pengontrol tersebut diaplikasikan guna mendeteksi apakah kehadiran investor lembaga mampu mengeskalasi atau justru mereduksi korelasi antara laporan keberlanjutan dengan mutu laba korporasi. Mengacu pada logika penalaran ilmiah serta hipotesis yang telah dibangun, skema keterkaitan antarafaktor dalam kajian ini secara visual disajikan pada Gambar 2.1



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Variabel Independen	X ₁	=	<i>Environmental</i>
Variabel Independen	X ₂	=	<i>Social</i>
Variabel Independen	X ₃	=	<i>Governance</i>
Variabel Moderasi	Z	=	Kepemilikan Institusional
Variabel Dependen	Y	=	Kualitas Lab
Variabel Interaksi	X ₁ Z	=	Interaksi antara <i>Environmental</i> dan KI
Variabel Interaksi	X ₂ Z	=	Interaksi antara <i>Social</i> dan KI
Variabel Interaksi	X ₃ Z	=	Interaksi antara <i>Governance</i> dan KI

2.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pedoman dalam penelitian yang berfungsi untuk memberikan batasan serta penjelasan mengenai bagaimana setiap variabel diukur secara konkret. Melalui definisi operasional, konsep-konsep teoritis yang bersifat abstrak dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Penjabaran operasional ini krusial untuk menetapkan instrumen serta skala ukur bagi tiap-tiap indikator, sehingga tahapan uji hipotesis melalui software statistik bisa terlaksana secara akurat. Selain itu, langkah ini berfungsi menetapkan klasifikasi pilar beserta parameter ukur yang melekat pada seluruh variabel yang diteliti. Rincian deskripsi mengenai operasionalisasi variabel dalam kajian ini secara lengkap dirangkum pada Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Sumber
1.	Kualitas Laba (Y)	Derajat mutu laba mengukur kapabilitas keuntungan akuntansi dalam merepresentasikan realitas finansial organisasi secara objektif, sekaligus menyediakan data yang andal untuk memproyeksikan kinerja jangka panjang. Profit yang kredibel dicirikan oleh tingkat stabilitas yang konsisten, keterbukaan informasi yang	$\text{Kualitas Laba} = \frac{\text{Arus Kas Operasional}}{\text{Laba Bersih}}$	(Rely & Arsjah, 2023)

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Sumber
		tinggi, serta terbebas dari intervensi kosmetik akuntansi (<i>earnings management</i>) sehingga sahlah dijadikan rujukan utama dalam perumusan kebijakan ekonomi. Kondisi ini mencerminkan tingginya nilai keandalan laba pada entitas terkait.		
2.	<i>Environmental (X1)</i>	Pengungkapan Lingkungan merupakan bentuk transparansi perusahaan dalam menyampaikan informasi terkait aktivitas dan kebijakan yang mempengaruhi lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan efisiensi energi. Dalam menentukan komponen penilaian indeks tersebut, indikator pengungkapan didominasi dan difokuskan pada kerangka kerja standar global GRI 300 (Topik Spesifik Lingkungan). Melalui pendekatan berbasis indeks GRI 300 ini,	$EnDI = \frac{\text{jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{total item yang digunakan dalam penelitian}} (32)$	(Masfiah, D.M dan Sulistyowati, E. 2025).

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Sumber
		tingkat transparansi serta akuntabilitas lingkungan perusahaan dapat diukur secara objektif, konsisten, dan memenuhi kriteria pelaporan keberlanjutan yang kredibel di pasar modal.		
3.	<i>Sosial (X2)</i>	Transparansi aktivitas kemasyarakatan emiten terkait jaminan kemakmuran staf dan kontribusi sosial demi mendongkrak citra korporasi serta kredibilitas bagi pemodal. Pengukuran variabel ini mengadopsi indikator baku standar global GRI 400, yang menguji aspek ketenagakerjaan, jaminan K3, pemenuhan HAM, kompetensi staf, kontribusi komunitas, hingga jaminan produk secara akuntabel.	SoDI $= \frac{\text{jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{total item yang digunakan dalam penelitian(40)}}$	(Masfiah & Sulistyowati, 2025)
4.	<i>Governance (X3)</i>	Keterbukaan instansi terkait sistem dan mekanisme manajemen dalam mengelola organisasi secara profesional. Kuantifikasi variabel mengadopsi	GoDI $= \frac{\text{jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{total item yang digunakan dalam penelitian(11)}}$	(Fujianti et al., 2024)

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Sumber
		indikator internasional kelompok GRI 100 (<i>Universal Standards</i>), khususnya butir GRI 102 dan GRI 103, yang membedah kepemimpinan manajemen puncak, integritas bisnis, pengendalian internal, serta kebijakan keterlibatan pihak terafiliasi.		
5.	Kepemilikan institusional (Z)	Kepemilikan saham oleh entitas non-individu, seperti institusi finansial, badan hukum atau investor institusional lainnya yang diungkapkan di akhir tahun buku perusahaan.	$\text{kepemilikan institusional} = \frac{\text{jumlah saham milik institusi}}{\text{Total saham beredar}}$	Lestari & Fitriastuti, (2025)

2.5. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban teoretis sementara terhadap rumusan masalah, hipotesis memerlukan pembuktian faktual menggunakan data empiris yang diperoleh dari lapangan. Hipotesis dalam studi ini merepresentasikan dugaan terstruktur mengenai interaksi atau korelasi antarvariabel penelitian. Adapun rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh *Environmental* terhadap Kualitas Laba

Penelitian La'bi, M. B., dan Daromes, F. E. (2025), *Environmental* merupakan dimensi keberlanjutan yang mencerminkan sejauh mana perusahaan

mampu mengelola dampak lingkungan melalui kebijakan efisiensi energi, pengurangan emisi, serta pengelolaan limbah, yang berfungsi sebagai indikator keandalan dan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Yohanna Cahyawati et al., (2024), pengungkapan *environmental* tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap standar lingkungan, tetapi juga memberikan sinyal transparansi dalam pelaporan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap kualitas informasi keuangan, termasuk kualitas laba.

Hubungan antara faktor *environmental* dan kualitas laba berakar pada Teori Sinyal (*Signaling Theory*). Dalam kerangka ini, transparansi pengungkapan aspek lingkungan diposisikan sebagai sinyal prospektif yang mengonfirmasi bahwa perusahaan menerapkan tata kelola yang akuntabel, memiliki risiko hukum ekologis yang rendah, serta berkomitmen pada keberlanjutan operasional jangka panjang. Implikasinya, pengungkapan tersebut mampu meningkatkan kepercayaan pasar terhadap orisinalitas laporan keuangan sekaligus meminimalkan tendensi manipulasi laba.

Penelitian Bilang et al., (2025) Temuan tersebut mengonfirmasi bahwa transparansi laporan ekologis berdampak nyata dalam meningkatkan mutu laba, sebab meluasnya publikasi isu lingkungan terbukti membatasi ruang gerak pengelola untuk mempraktikkan kosmetik akuntansi. Hasil tersebut diperkuat oleh penelitian Cahyawati dan Azizah (2024) yang menemukan bahwa dimensi *environmental* dari ESG mampu meningkatkan kredibilitas pelaporan kinerja perusahaan dan menghasilkan kualitas laba yang lebih reliabel. Konsistensi temuan ini menunjukkan bahwa komitmen perusahaan terhadap aspek

lingkungan mampu memperkuat kredibilitas informasi laba yang disajikan pada laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Environmental* berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.5.2 Pengaruh *Social* terhadap Kualitas Laba

Dimensi *Social* dalam kerangka *Environmental, Social, and Governance* mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam mengelola hubungan dan interaksinya dengan para *stakeholders* kunci, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan komunitas. Kinerja sosial yang kuat, seperti program kesejahteraan karyawan, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, serta dukungan komunitas, adalah indikator penting. Perusahaan yang memprioritaskan loyalitas pelanggan dan penciptaan nilai bagi para *stakeholders* dapat meningkatkan produktivitas, retensi karyawan, dan reputasi perusahaan. Pengungkapan aspek sosial yang ekstensif menunjukkan komitmen perusahaan terhadap penciptaan nilai jangka panjang.

Penelitian Rahman, A. F., Bintoro, N. S., dan Dewi, A. A. (2024), menunjukkan bahwa pilar *Social* memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap relevansi nilai Laba Per Saham (EPS). Temuan ini membuktikan bahwa informasi *Social* digunakan oleh investor dan *stakeholders* sebagai basis pengambilan keputusan, sehingga memperkuat kepercayaan terhadap kualitas laba yang dilaporkan. Bukti pendukung lainnya datang dari Vatis, S. E., Drogalas, G., dan Persakis, A. (2025), Secara empiris, kajian tersebut menegaskan bahwa transparansi aspek kemasyarakatan berkontribusi positif

dalam mengoptimalkan mutu keuntungan serta meminimalkan tindakan rekayasa pembukuan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih kredibel dan terbuka. Mengacu pada landasan teoretis tersebut, anggapan sementara dalam riset ini dapat disusun sebagai berikut:

H2 : *Social* berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.5.3 Pengaruh *Governance* terhadap Kualitas Laba

Governance merupakan dimensi keberlanjutan yang mencerminkan sistem dan struktur internal yang mengatur bagaimana perusahaan dikelola, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*. Aspek ini mencakup komposisi dewan direksi, independensi komite audit, hak pemegang saham, dan transparansi remunerasi manajemen. Penerapan tata kelola internal yang andal berperan sebagai instrumen kontrol primer. Kehadiran instrumen ini diarahkan untuk menekan potensi friksi agensi antara pengelola dengan pemilik modal, sekaligus menjamin bahwa setiap kebijakan manajemen berorientasi penuh pada kemakmuran organisasi.

Hubungan antara *Governance* dan kualitas laba didasarkan kuat pada Teori Agensi (*Agency Theory*) dan diperkuat oleh Teori Sinyal (*Signaling Theory*). Mekanisme *Governance*, seperti keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit yang aktif, bertindak sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*) yang mengawasi proses pelaporan keuangan. Pengawasan yang ketat ini secara signifikan membatasi peluang manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba (*earnings management*), sehingga pengungkapan *Governance* yang tinggi

memberikan sinyal positif bahwa laporan keuangan memiliki integritas dan kualitas laba yang lebih tinggi.

Penelitian Polimpung, L. J. C. (2020), dalam studinya mengonfirmasi bahwa instrumen *governance*, salah satunya keberadaan komite audit, terbukti memberikan dampak positif yang nyata dalam menaikkan mutu keuntungan akuntansi. Hasil ini konsisten dengan temuan Persakis et al., (2025) dalam jurnal *Sustainability* yang menunjukkan bahwa pengungkapan *Governance* mampu meningkatkan Kualitas Laba (*Earnings Quality*) dan secara efektif membatasi manajemen laba riil (*Real Earnings Management*). Selaras dengan hal itu, studi terdahulu oleh Rahman et al., (2024) turut mempertegas bahwa data ESG pada komponen tata kelola mempunyai nilai relevansi tinggi, sehingga jamak dijadikan parameter utama bagi penanam modal dalam merumuskan kebijakan investasi. Berlandaskan pada kajian teoritis tersebut, kesimpulan sementara dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

H3 : *Governance* berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.5.4 Moderasi Kepemilikan Institusional pada Pengaruh *Environmental* terhadap Kualitas Laba

Variabel kepemilikan oleh lembaga menggambarkan porsi ekuitas emiten yang dikuasai oleh instansi finansial berskala besar, contohnya lembaga perbankan, manajer investasi, hingga badan pengelola dana pensiun. Melalui ketersediaan kapital yang kuat serta dukungan kapabilitas analisis yang mendalam, entitas korporasi ini dinilai mempunyai motivasi sekaligus kecakapan untuk menjalankan fungsi pengendalian tingkat tinggi (*superior*

monitoring) atas capaian operasional dan sistem tata kelola organisasi. Kehadiran kepemilikan Institusional yang tinggi adalah mekanisme *Governance* internal yang efektif.

Variabel moderasi dijelaskan melalui Teori Agensi (*Agency Theory*). Dalam konteks keberlanjutan, investasi pada aspek *Environmental* sering memicu manajer melakukan *Earnings Management* oportunistik untuk menyembunyikan biaya. Kepemilikan Institusional bertindak sebagai moderator dengan cara membatasi *Earnings Management* tersebut. Pengawasan kepemilikan Institusional memastikan bahwa kinerja *Environmental* yang positif tidak dinodai oleh manipulasi laba, sehingga secara efektif memperkuat hubungan positif antara kinerja *Environmental* dan Kualitas Laba yang disajikan.

Dukungan empiris yang menguatkan hipotesis ini ditemukan dalam beberapa studi mutakhir. Penelitian oleh Amer, A. M. M., Azimli, A., dan Adedokun, M. W. (2025), menemukan bahwa Kepemilikan Institusional dan independensi dewan komisaris secara signifikan memoderasi dampak buruk dari *Earnings Management* terhadap *Corporate Sustainability Performance*. Temuan ini secara implisit menggarisbawahi peran KI dalam menjaga integritas informasi keberlanjutan (termasuk aspek *Environmental*) dari manipulasi laba. Selain itu, penelitian Widianingsih, P. Y. N., Setiawan, D., dan Aryani, Y. A. (2024), memperkuat bahwa peningkatan Kepemilikan Institusional berkorelasi dengan penurunan *Earnings Management* secara umum, yang secara konsisten

mendukung fungsi pengawasan KI terhadap kualitas pelaporan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh *Environmental* terhadap Kualitas Laba.

2.5.5 Moderasi Kepemilikan Institusional pada Pengaruh *Social* terhadap Kualitas Laba

Kepemilikan Institusional merujuk pada persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi profesional besar (seperti bank, perusahaan asuransi, reksa dana, dan dana pensiun). Institusi ini, karena memiliki modal yang besar dan sumber daya analisis yang memadai, dipandang memiliki insentif dan kemampuan untuk melakukan pengawasan superior (*superior monitoring*) terhadap kinerja dan tata kelola perusahaan. Kehadiran KI yang tinggi adalah mekanisme *Governance* internal yang efektif.

Peran Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi dijelaskan melalui Teori Agensi (*Agency Theory*). Dalam konteks keberlanjutan, investasi pada aspek *Social* (meliputi program kesejahteraan karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan komunitas, dan hak asasi manusia) sering memerlukan alokasi biaya yang signifikan dan berorientasi jangka panjang. Kondisi ini dapat memicu manajer untuk melakukan *Earnings Management* oportunistik, yang bertujuan untuk menutupi dampak biaya *Social* terhadap laba jangka pendek. KI, sebagai investor institusional yang fokus pada kriteria ESG termasuk sosial, bertindak sebagai moderator dengan cara membatasi praktik EM yang terkait dengan pengeluaran *Social*. Pengawasan KI memastikan bahwa

investasi *Social* yang positif adalah sah dan hasilnya dilaporkan secara transparan. KI secara efektif memperkuat hubungan positif antara kinerja *Social* yang tinggi dan Kualitas Laba yang disajikan perusahaan.

Penelitian oleh Setiawati, E., Sekarningrum, A., dan Witono, B. (2025), menemukan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, ketika dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional, memiliki pengaruh signifikan terhadap *Earnings Management* pada perusahaan LQ45. Temuan ini secara langsung mendukung peran pengawasan KI dalam menjaga akuntabilitas pelaporan sosial perusahaan. Biki et al., (2025), yang secara eksplisit meneliti pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi, menyimpulkan bahwa peran KI adalah signifikan dalam memperkuat hubungan positif tersebut, yang secara implisit menuntut kualitas pelaporan laba yang lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh *Social* terhadap Kualitas Laba.

2.5.6 Moderasi Kepemilikan Institusional pada Pengaruh *Governance* terhadap Kualitas Laba

Kepemilikan Institusional merujuk pada persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi profesional besar (seperti bank, perusahaan asuransi, reksa dana, dan dana pensiun). Institusi ini, karena memiliki modal yang besar dan sumber daya analisis yang memadai, dipandang memiliki insentif dan kemampuan untuk melakukan pengawasan superior (*superior monitoring*) terhadap kinerja dan

tata kelola perusahaan. Kehadiran KI yang tinggi adalah mekanisme *Governance* internal yang efektif.

Peran Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi dijelaskan melalui Teori Agensi (*Agency Theory*). Unsur kelola (*governance*) dalam laporan ESG menggambarkan keandalan tatanan serta alur regulasi internal organisasi. Hal ini tercermin melalui beberapa parameter krusial, meliputi tingkat kemandirian dewan pengawas, kinerja komite audit yang optimal, hingga jaminan perlindungan hak bagi para pemilik modal. Skor *Governance* yang tinggi menunjukkan mekanisme internal yang mapan untuk mencegah perilaku oportunistik manajer, terutama *Earnings Management*, sehingga menghasilkan Kualitas Laba yang tinggi.

Kepemilikan Institusional berperan sebagai moderator yang memperkuat hubungan positif antara *Governance* yang baik dan Kualitas Laba. KI, sebagai pemegang saham besar yang aktif dalam pemantauan, memastikan bahwa mekanisme *Governance* yang ada tidak hanya bersifat formalitas (*window dressing*) tetapi benar-benar diimplementasikan secara efektif. Dengan kata lain, pengawasan yang intens dari KI memastikan bahwa struktur tata kelola yang tercermin dalam skor *Governance* benar-benar berhasil membatasi praktik EM oleh manajemen. Oleh karena itu, KI secara efektif memperkuat dampak positif dari *Governance* terhadap Kualitas Laba.

Penelitian Irmasari, H. (2025), yang menguji Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Earnings Management* menemukan bahwa *Audit Tenure* dapat memperkuat pengaruh Kepemilikan Institusional dalam membatasi

Earnings Management. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan KI (yang merupakan bagian dari mekanisme *Governance*) akan meningkat ketika didukung oleh elemen tata kelola lainnya. Davis, J. G., dan Garc, M. (2025), yang menganalisis data selama 39 tahun di Amerika Serikat, menyoroti peran sentral Kepemilikan Institusional dalam mempengaruhi keputusan manajerial dan *Earnings Management*. Penelitian ini menegaskan bahwa KI memiliki pengaruh substansial terhadap tata kelola perusahaan dan perilaku pelaporan laba, yang sangat relevan ketika KI bekerja sinergis dengan mekanisme *Governance* internal. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh *Governance* terhadap Kualitas Laba.

